

**DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN/RAHASIA
KELURAHAN DUREN SAWIT KECAMATAN DUREN SAWIT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

NO	NAMA/KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	JANGKA WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PENTINNYA BAGI PUBLIK	
				JIKA DIBUKA	JIKA DITUTUP
1	Data Pribadi Masyarakat pada Dokumen Administrasi Surat Pernyataan Waris, Surat Tanah Letter C dan Surat Keterangan PM1	1. Pasal 85 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terbuka apabila mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat menimbulkan penyalagunaan data informasi pribadi seseorang dan dapat menimbulkan gugutan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi pribadi penduduk
2	Data Pribadi Pegawai dalam dokumen administrasi dan database dalam sistem informasi	1. Pasal 85 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terbuka apabila mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat menimbulkan penyalagunaan data informasi pribadi seseorang dan dapat menimbulkan gugutan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi pribadi penduduk
3	Data Pribadi dalam dokumen administrasi RW, RT, LMK, Kader Jumantik, Dasawisma, Bayi Stunting, dan Penerima bantuan dalam dokumen administrasi	1. Pasal 85 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terbuka apabila mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat menimbulkan penyalagunaan data informasi pribadi seseorang dan dapat menimbulkan gugutan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi pribadi penduduk
4	Dokumen DPA, RKA dan SPJ Keuangan yang belum diaudit	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17	1. Terbuka sampai audit keuangan selesai dan 2. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/Lembaga Pemerintah secara tertulis	Dapat menimbulkan potensi penyalagunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang	Melindungi dari potensi penyalagunaan oleh pihak yang berwenang

5	Dokumen HPS	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Barang/Jasa Pemerintah	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/Lembaga Pemerintah secara tertulis	Dapat menimbulkan potensi penyalagunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang	Melindungi dari potensi penyalagunaan oleh pihak yang berwenang
6	Kode Akses Elektronik (Password Aplikasi E-Gov Pemprov DKI Jakarta)	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 6 2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 angka 16	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/Lembaga Pemerintah secara tertulis	Dapat menimbulkan penyalagunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan kode akses elektronik
7	Dokumen Penawaran Teknis	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b dan i	1. 5 Tahun dan Terbuka apabila ada perintah pengadilan/Lembaga Pemerintah secara tertulis.	Dapat menimbulkan potensi penyalagunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang	Mengamankan Hak kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat
8	Naska dinas yang menurut sifatnya rahasia	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/Lembaga Pemerintah secara tertulis	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik

Jakarta, 5 Juli 2024

PPID Kelurahan Duren Sawit



Waldi Septri

NIP. 197909032010011016